

Pemolisian Ketahanan Pasca Bencana Gempa dan Tsunami di Aceh 2004

Bakharuddin Muhammad Syah

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Indonesia

* Email untuk Korespondensi: bakharuddinmsyah93@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

police disaster
management; tsunami
Aceh 2005; kepolisian

Keywords:

police disaster
management, Aceh
Tsunami 2005; police

Ketika bencana terjadi, kekacauan pun datang. Masyarakat secara keseluruhan kehilangan arah dalam upaya memulihkan ketertiban dan pulih dari kepanikan. Itulah sebabnya, kehadiran polisi dan tokoh-tokoh yang berwibawa pada saat krisis menjadi penting, sehingga analisis utama dari penelitian ini adalah hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Metode penelitian ini menggunakan sebuah desain kualitatif digunakan untuk mempertimbangkan perspektif otoritas lokal dan anggota masyarakat. Analisis data menunjukkan bahwa kepolisian memiliki peran penting dalam rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak, meskipun menghadapi tantangan besar, termasuk kriminalitas dan trauma di kalangan personil dan masyarakat. Temuan penelitian ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum tentang pentingnya peran kepolisian dalam pemulihan pasca bencana dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan strategi penanganan bencana di masa depan, dengan tujuan meningkatkan ketahanan masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi daerah lain yang rentan terhadap bencana, membantu mereka mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk meminimalkan dampak negatif dari bencana.

When disaster strikes, chaos comes. The society as a whole was disoriented in an effort to restore order and recover from panic. That is why the presence of the police and authoritative figures in times of crisis is important, so the main analysis of this study is this. This study aims to identify the steps taken by the police in maintaining security, order, and supporting the rehabilitation and reconstruction process in the affected areas. This research method uses a qualitative design used to consider the perspectives of local authorities and community members. Data analysis shows that the police have an important role to play in the rehabilitation and reconstruction of affected areas, despite facing major challenges, including criminality and trauma among personnel and communities. The findings of this study provide insight for policymakers and law enforcement agencies on the importance of the role of the police in post-disaster recovery and offer recommendations to improve future disaster management strategies, with the goal of improving community resilience. The research can also serve as a reference for other disaster-prone areas, helping them better prepare to minimize the negative impact of disasters.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Pemolisian ketahanan mengambil paradigma baru dalam tata Kelola keamanan yang memperluas strategi pemolisian masyarakat dan perpolisian yang berorientasi pada masalah untuk mengembangkan dan mempertahankan jaringan pembelajaran yang polisentris, kolaborasi, mandiri yang memungkinkan masyarakat untuk mengantisipasi dan merespons secara efektif setiap dinamika dan kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Sebagai respon dari keberadaan masyarakat Indonesia yang tidak lepas dari perubahan iklim atau hal – hal yang bernuansa sosial, dapat menimbulkan gangguan bagi polisi dan masyarakat (Hidayat, 2022;

Rahman & Noor, 2020). Aktor dan jaringan kepolisian memiliki peran dalam meningkatkan ketahanan terhadap suatu bencana atau sebagai suatu sistem komunitas / masyarakat yang terkena bahaya untuk melawan, menyerap, mengakomodasi dan pulih dari dampak bencana (Djamhari et al., 2022; Novita, 2020). Termasuk mengatasi bahaya bencana dalam suatu linimasa waktu. Pemolisian Ketahanan merupakan titik berangkat tentang bagaimana organisasi kepolisian dapat berkontribusi pada kolaborasi yang terjadi akibat hal – hal kebencanaan. Ini merupakan kajian terhadap kajian ketahanan masyarakat sebagaimana gagasan Norris, dkk pada tahun 2008, tentang ketahanan masyarakat dan gagasan Parsons dkk pada tahun 2016, tentang kapasitas adaptif dan kapasitas mengatasi yang berkaitan dengan manajemen bencana dan bagaimana peran kepolisian terhadapnya (Norris et al., 2008; Parsons et al., 2016).

Dalam situasi di mana tidak ada penegak hukum atau polisi yang menjaga dan menjamin keteraturan dan ketertiban sosial dalam situasi chaos pasca gempa dan tsunami, secara hipotesis dapat dikatakan tindakan-tindakan kejahatan merebak terhadap para pengungsi yang kondisi fisik dan sosialnya lemah. Kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pasca gempa mengalami turunya fungsi yang begitu signifikan sehingga dalam melaksanakan tugas – tugas kepolisian menarik untuk diteliti bagaimana agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga khususnya ketika berhadapan dengan kejahatan (Dadek et al., 2023; Rijanta et al., 2018).

Tulisan ini berfokus pada Peran Kepolisian sebagai sumbangan pada pemolisian ketahanan dalam menghadapi bencana atau meningkatkan efektivitas dan daya tanggap sistem tata Kelola ketika terjadi kebencanaan khususnya pada saat kejadian Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Aceh, Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dari pendekatan yang digunakan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peran kepolisian dalam menghadapi bencana di masa depan. Manfaat dari penelitian ini meliputi peningkatan pemahaman mengenai peran vital kepolisian dalam pemulihan pasca bencana, yang dapat digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki strategi penanganan bencana di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, dan organisasi kemanusiaan dalam merancang program-program yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung ketahanan masyarakat pasca bencana. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain yang rentan terhadap bencana, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan meminimalkan dampak negatif dari bencana yang mungkin terjadi.

METODE

Sebuah desain kualitatif digunakan untuk mempertimbangkan perspektif otoritas lokal dan anggota masyarakat (Agustianti et al., 2022; Pahleviannur et al., 2022). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif otoritas lokal dan anggota masyarakat dalam memahami keefektifan komunikasi antara aparat, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Sesuai dengan panduan Creswell pada tahun 1997, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada dan memahami proses dari sudut pandang para partisipan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussions*) (Zakariah et al., 2020). Observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk mengalami secara langsung kondisi dan interaksi sosial di lapangan. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali perspektif dan pengalaman personal aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat, sementara diskusi kelompok terarah berfungsi untuk memfasilitasi dialog antara berbagai pemangku kepentingan dan memperoleh pemahaman kolektif.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, dimana peneliti menguraikan temuan berdasarkan kondisi dan konteks sosial yang mempengaruhi ketahanan masyarakat di Provinsi Aceh pasca Gempa dan Tsunami tahun 2004. Proses analisis melibatkan pengkodean data untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan stres, adaptasi, kesejahteraan, dan dinamika sumber daya sosial, sesuai dengan kerangka teori Norris et al pada tahun 2008. Tema-tema yang muncul kemudian diinterpretasikan untuk memahami bagaimana aspek-aspek tersebut berkontribusi terhadap ketahanan masyarakat dan pemolisian ketahanan dalam menghadapi bencana. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk pengembangan strategi penanggulangan bencana yang lebih efektif di masa depan, dengan fokus pada peningkatan ketahanan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik di Aceh, struktur birokrasi Aceh setelah adanya perlakuan khusus, yaitu adanya sistem hukum Islam di Aceh, peta kekuatan GAM dan sekte-sekte serta kelompok-kelompoknya. Hal ini merupakan tugas polisi yang sangat penting karena menunjang pekerjaan mereka, untuk memahami masyarakat yang harus dilindungi, dilayani dan diayomi. Dimana polisi harus terus berusaha menangkap karakter masyarakat setempat sebagai pedoman utama dan utama dalam tugas-tugas pemolisianannya (Adnyani, 2021; Zulkifli, 2020).

Secara konteks dalam tulisan ini bisa digambarkan dalam deskripsi di bawah ini, "Pemolisian saat gempa, Polisi sebetulnya sudah bekerja untuk membantu mengevakuasi korban atau mengambil mayat. Tetapi pelayanan memang tak dapat dilakukan karena kantor Polres Rusak. Polres Banda Aceh terdiri dari 18 polsek, yang hilang sebanyak 6 polsek, 3 polsek rusak berat dan 9 aman atau tidak terkena tsunami. Saat itu anggota juga bingung dan mereka sibuk mengurus atau menyelamatkan keluarganya masing-masing. Kami polisi itu ibaratnya kalendernya adalah fotocopy, jadi tidak ada hari libur semuanya hitam. Hari ke-2 Polres melakukan apel besar untuk konsolidasi dan pengecekan. Hari ke-3 Polres sudah bisa operasional dan saat itu masyarakat atau anggota masih mengalami trauma berat. Dan saat itu ada isu-isu terjadinya tsunami susulan dan bila ada gempa ada yang berteriak "air...air..." anggotapun ikut panik sampai saya mengeluarkan tembakan ke udara agar mereka tetap tenang. Mabes malah menyalahkan kenapa polisi tidak bekerja. Kerja kami memang tidak ada yang menyiarkan oleh media, tapi kami memang bekerja terus dan bukan media patokannya. Bantuan dari Jakarta kadang-kadang tidak efisien. Dikirim orang tetapi tidak membawa perlengkapan untuk evakuasi, jadi membantu menyiapkan kebutuhan yang diperlukannya. Masalah air bersih juga perlu dipikirkan dalam pengiriman personil, kalau tak ada air bersih bagaimana? ini kan repot lagi apalagi alat berat. Pelayanan terhadap masyarakat yang kehilangan surat-surat seperti STNK, BPKB, kami memberikan surat keterangan membawa kendaraan dan kami juga belum bisa memberi batas waktunya. Kami dalam memberikan surat keterangan juga menggunakan saksi dari polisi yang mereka kenal agar dapat menjadi jaminan dan bila sesuatu di kemudian hari kami tidak disalahkan. Masalah komunikasi juga menjadi sangat penting untuk Kodal karena tak bisa berjalan dengan cepat dalam mengcover segala kejadian yang ada. Dari Mabes alat komunikasi (HT) diganti model lain sehingga alat komunikasi yang lama tidak dapat digunakan. Padahal bantuan dari Mabes hanya berjumlah 30 buah sedangkan HT yang lama berjumlah 250 buah. Anggaran itu juga perlu dipikirkan. Bulan Januari kami hanya dapat gaji 1 juta itu juga hanya pinjaman, dan setelah tsunami ini masing-masing operasi juga tak tepat waktu turunnya anggaran. Bantuan alat-alat seperti pacul dsb untuk membersihkan sampah alat itu ternyata kualitasnya jelek dan justru malah menjadi beban, polri memang harus juga mempunyai alat-alat berat dan alat-alat untuk mendukung operasional. Proses penyidikan tindak pidana yang sanksinya menjadi korban tsunami, barang buktinya hilang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Janto dan sedang dimintakan Fatwa oleh PN ke MA. Untuk mengatasi kekurangan anggota lalu lintas, Anggota Brimob di beri ban lengan Lantas untuk mengatur Lalu Lintas, walaupun sering terjadi kesemrawutan karena Brimob tidak pernah melakukan pengaturan Lantas. Di Polres juga mendapat instruksi dari Mabes atau dari satuan atas untuk menangkap penjahar, setelah dilakukan penangkapan ternyata orang-orang tersebut mengambil besi tua untuk dijual dan hasil penjualan untuk makan sehari-hari. Dan untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional, Polres ambil komputer dengan bayar belakangan ke Medan karena ada bantuan Komputer tetapi untuk Polres Aceh Besar yang tidak terkena tsunami, tetapi diminta untuk Polres Banda Aceh tidak boleh".

Ada beberapa identifikasi yang dilakukan oleh Kepolisian yakni a) inventarisasi data personnel, logistik, anggaran dan sistem pasca bencana masih terus dilaksanakan; b) kegiatan kepolisian antara personel organik dan personil Satgas dapat terlaksana dengan sinkronisasi; c) rehabilitasi markas Polda Nanggroe Aceh Darussalam agar dapat menjadi sentra kegiatan kepolisian; d) rehabilitasi trauma di kalangan personil; e) pendataan rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi; f) optimalisasi peran dari satgas (markas besar polisi) dan Kepolisian Daerah NAD; g) fungsi dan aktivitas nyata dari kepolisian di lapangan; h) gangguan dan ancaman dari gerakan Aceh merdeka yang dapat diminimalisir dan di lokalisasi; i) penegakan hukum yang meliputi pada penjahar barang-barang pasca gempa, gerakan Aceh merdeka, pembunuhan, penculikan, ledakan senjata, penembakan dan lain sebagainya; j) kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan bersama dengan Basarnas; k) pengamanan dan pengawasan terhadap orang asing dengan kerjasama lintas sektoral; l) kegiatan bersama antar instansi terkait antara relawan kemanusiaan, dan melakukan koordinasi dengan entitas asing.

Dari data yang diperoleh, Tindakan kejahatan pasca gempa terjadi karena banyaknya korban tewas dan hilang dari bencana alam, adanya trauma yang menghantui para petugas kepolisian maupun korban yang selamat pasca gempa dan tsunami. Tindakan kejahatan dilakukan oleh mereka yang masih merasa lebih kuat dan berpedoman akan adanya keuntungan material ataupun untuk memperkaya diri sendiri. Tindakan yang dilakukan seperti melakukan penjarahan atas rumah-rumah yang kosong, perampasan, pemalakan terhadap harta benda pengungsi (Rahmita, 2023; Umar et al., 2021).

Permasalahan yang dihadapi yakni 1) tiadanya data mengenai kejahatan yang ada yang diderita oleh para pengungsi selama pasca gempa dan tsunami; 2) tiadanya data mengenai personil Polri yang selamat dan

kelengkapan sarannya; 3) tiadanya data mengenai fungsi kekerabatan dari para pengungsi dalam menangkal Tindakan kejahatan, menciptakan keteraturan dan ketertiban sosial dari lingkungan sosial pasca gempa dan tsunami.

Data yang dikumpulkan oleh tim peneliti di Banda Aceh dan Meulaboh adalah: 1) Berbagai bentuk kejahatan terhadap pengungsi (Pencurian, Penjarahan, Perampasan, Perampokan, Penipuan, Pemalakan, Pelecehan Seksual, Penganiayaan, Rasa Ketakutan yang dialami oleh pengungsi, Kejahatan lainnya); 2) Wilayah Polres dan Polsek; 3) jumlah dan kondisi personil Polres, Polsek yang tersisa dan kegiatan pemolisiannya; 4) pemrosesan tindak pidana; 5) masalah yang dirasakan warga masyarakat (masalah tanah / rumah dan kepemilikannya, masalah waris, masalah kendaraan, relokasi dan pembangunan Kembali); 6) isu politik, pencurian sumbangan, GAM, TNI – Polri, pendatang – Penduduk asli dsb.



Gambar 1
Peta Terdampak Bencana Alam Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berada di atas garis khatulistiwa pada koordinat 2° - 6° LU dan 95° - 99° BT, merupakan wilayah RI paling Barat terdiri dari daerah pantai, daratan dan pegunungan Bukit Barisan dengan hutan yang lebat, sungai-sungai besar dan kecil yang mengalir ke pantai Barat, Selatan dan pantai Timur / Utara. Sedangkan pantai Barat dengan dataran yang relatif sempit dan jurang-jurang yang terjal. Di tengah-tengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdapat Danau laut Tawar sedangkan pantai Timur relatif lebar dan landai. Ketinggian wilayah Provinsi NAD dari permukaan air laut rata-rata 125 meter. Jumlah penduduk daerah Nanggroe Aceh Darussalam sensus 2000 tercatat 4.144.500 jiwa yang terdiri dari berbagai suku dengan pertumbuhan penduduk lebih kurang 3% per tahun dan 2.206.494 berusia produktif, mayoritas penduduk beragama Islam. Di wilayah ini terdapat Suku Aceh hampir di seluruh wilayah Provinsi, Suku Gayo di Kab. Aceh Tengah, Suku Alas di Kab. Aceh Tenggara, Suku Tamiang / Melayu di Pesisir Timur, Suku Nias di Simeulue, Suku Batak, Jawa, Padang Sebagian kecilnya di NAD.

Sesuai dengan Keputusan Kapolri No: Kep/54/X/2002 tentang satuan organisasi tingkat POLDA sebagai berikut: Polres (10 buah) yaitu Polresta Banda Aceh, Polres Aceh Besar, Polres Pidie, Polres Aceh Utara, Aceh Bireun, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Polres Sabang, Brimobda Aceh 4 Kompi, Polsek (134).

Ketidakseimbangan penghasilan dan pendapatan tersebut, terbatasnya penyediaan lapangan kerja berakibat bertambah banyaknya pengangguran yang pada gilirannya akan memberi peluang bagi timbulnya kriminalitas dan bertitik tolak dari latar belakang pendidikan, kebudayaan dan fanatisme kedaerahan serta fanatisme agama yang sempit akan dapat berpengaruh terhadap kesatuan dan persatuan bangsa. Daerah Nanggroe Aceh Darussalam memiliki Sumber Daya Alam yang sangat berpotensi yaitu : Sektor pertanian : padi, kopi, cengkeh, dan pala; Sektor perkebunan: karet, kelapa sawit dan nilam; Sektor pertambangan: minyak, gas bumi dan emas; Sektor kehutanan : kayu, rotan dan damar; Sektor perikanan: ikan darat dan laut; dan Sektor industri: gas alam cair (LNG), pupuk, kertas dan semen.

Di Aceh, sebelum gempa dan tsunami memang terdapat kelompok separatis yang terlatih di Libya, dan beberapa tempat di Aceh. Mereka terpengaruh paham Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kelompok massa biasanya juga terdiri dari organisasi kemahasiswaan, mereka senantiasa mengatasnamakan dan mengedepankan massa untuk menuntut kemerdekaan Aceh serta kelompok kriminal yang memanfaatkan

situasi (cenderung memiliki hubungan dengan kelompok separatis GAM). Gerakan Separatis GAM ada di sekitar Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, Simeulue, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Sabang.

Gangguan kamtibmas antara lain unjuk rasa, kerusuhan, selebaran gelap, penyelundupan, masalah tanah, penimbunan barang, perkelahian pelajar, SARA, lingkungan hidup, perkelahian antar suku, TKI Gelap, Curat, Curas, Curanmor, Anirat, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, narkoba, perjudian, handak, preman, pencurian kayu, pencurian hasil laut dan lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan operasi pemuliharaan keamanan, dilaksanakan operasi SAWEU GAMPONG dengan melaksanakan ambang desa / silaturahmi dengan paket – paket sembako, melaksanakan bakti sosial, penyuluhan – penyuluhan pada para pelajar. Untuk operasi rutin kepolisian diarahkan pada lokasi rawan kamtibmas dan kewaspadaan tinggi. Operasi khusus kepolisian fokus pada menanggulangi kriminalitas berkadar tinggi dan kewilayahan. Pencurian ranmor, pencurian dengan pemberatan, pembunuhan, pengrusakan, penganiayaan berat, narkoba, pembakaran terjadi di Kuta Alam, Baiturrahman, Syiah Kuala dan Ulee Lheue.

Korban hilang dari Polri dan keluarganya termasuk diantaranya Sat Pol Air 118 Anggota, brimob 440 anggota (1760 orang), polresta kebun kelapa 100 anggota (400 orang), Pungai 200 orang (800 orang), lamteumen satu 100 anggota (400 orang), lamteumen dua 300 anggota (1200 orang), Ule Leu 100 anggota (400 orang), ujung Karang Meulaboh 400 anggota (1600 orang), Tapak Tuan 400 anggota (1600 orang).

Dalam pengamatan penjarahan dan pencurian skala kecil dan sporadik benar terjadi pada penjarahan besar – besaran yang menyangkut brangkas – brangkas emas, pembobolan toko emas dan lainnya. Walau tidak terbukti secara nyata bahwa anak – anak yang ada di pengungsian Sebagian besar tidak memiliki ayah dan ibu alias sebatang kara, anak – anak ini sangat rentan perdagangan orang. Pelecehan seksual juga terjadi di daerah – daerah pengungsi motifnya karena tidak ada uang sama sekali untuk membeli barang yang bukan hanya makanan. Makanan tersedia di daerah bencana dan berlimpah. Kemudian juga terdapat friksi antara TNI AD dengan pasukan asing. Pasukan asing berkeinginan untuk memberikan bantuan langsung dengan menjatuhkannya dari helikopter sedang pihak TNI AD berkeinginan agar dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagikan secara adil dan juga TNI AD tidak ingin agar bantuan jatuh kepada kelompok GAM / Gerakan Aceh Merdeka. Penganiayaan dan pemalakan juga terjadi pada pengungsi yang rentan.

Lokasi penampungan pengungsi juga terdapat di medan yang sulit dan akibat infrastruktur yang rusak berat. Sangat mustahil pada saat itu mengumpulkan dalam waktu cepat semua korban yang tersisa. Artinya masih ada yg bertahan di daerah bencana dan memakan apa yang ada di sekelilingnya. Pihak Satkorlak (Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana) membuat kebijakan satu atap penerimaan bantuan di satu tempat. Namun pihak Satkorlak pada saat itu juga tidak mampu membagikan semua bantuan kepada semua korban tersebar di Aceh Barat dan Aceh Jaya. Sedangkan bantuan internasional rata – rata siap dengan segala alat transportasinya. Setelah didesak oleh berbagai pihak LSM dan bupati, akhirnya satkorlak membiarkan bantuan internasional untuk turun langsung mendistribusikan dengan syarat harus melaporkan kemana saja distribusinya. Disimpulkan oleh peneliti bahwa manajemen distribusi terkesan berbelit – belit tidak sesuai dengan keadaan yang memaksa membutuhkan Tindakan cepat.

Temuan lainnya yang juga penting adalah adanya lokasi perumahan yang terkena gempa banyak yang batas – batasnya hilang, sehingga kepemilikannya sangat sulit. Pada saat itu BPN / Badan Pertanahan juga membutuhkan waktu. Daerah yang telah rata dengan tanah, warga/pemerintah setempat mengalami kesulitan untuk menentukan batas-batas tanah yang pernah ditinggali. Pendetang yang berasal dari Jawa, Medan/Padang tidak ada masalah yang menunjukkan diskriminasi atau pengusiran terhadap orang non Aceh/upaya untuk mengacuhkan. Mereka rata-rata sudah lama tinggal di Aceh dan sudah bisa berbahasa Aceh. Potensi konflik antara penduduk asli dengan pendatang juga tidak terekam dalam penelitian. Surat berharga seperti STNK dan BPKB serta surat rumah menjadi masalah serius akibat hilangnya surat – surat berharga pasca gempa dan tsunami. Perihal adopsi atas anak – anak yang kehilangan orang tua juga masalah yang serius. Ada yang memangulus ingin mengadopsi ada yang menggunakan dalih adopsi untuk kemudian diperdagangkan.

Diantara warga yang selamat dan tidak terkena bencana mengumpulkan barang – barang yang bukan miliknya untuk bisa dijual dan digunakan sehari – hari, ada juga warga yang sengaja memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan untuk menjarah / mengambil barang – barang yang bukan miliknya. Banyak juga warga / korban selamat yang masih trauma. Gempa – gempa susulan yang terjadi setelahnya juga membuat situasi kepanikan sehingga warga meninggalkan harta bendanya untuk berhamburan ke jalan dan lari meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Ini juga rawan pencurian dan penjarahan. Pelayanan kepada masyarakat yang kehilangan surat – surat STNK, BPKB diberikan surat keterangan membawa kendaraan (sementara). Bantuan alat – alat seperti pacul untuk membersihkan sampah ternyata kualitasnya juga tidak bagus untuk dipakai membersihkan puing dan sampah – sampah. Ada juga penjarah yang mengambil besi tua dan bekas untuk dijual.

Selama 14-15 Januari 2005 banyak juga anggota GAM yang menyerahkan diri dengan mendatangi polres setempat. Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum oleh Polisi masih berjalan dengan baik walau

kondisinya pasca bencana. Dalam memberikan surat keterangan membawa kendaraan, kepolisian juga hati – hati. Perlu adanya saksi dari polisi / orang yang dikenal untuk membuktikan bahwa kendaraan yang dibawa pelapor adalah benar – benar korban bencana dan surat – suratnya hilang. Kepolisian melakukan pendataan terhadap personel Polri, mengadakan rehabilitasi, gangguan GAM yang dapat diminimalisir, kegiatan pengaturan, pengawalan dan patroli juga sudah dilaksanakan, penegakan hukum terhadap penjahat juga sudah dilakukan. Penangkapan terhadap anggota Gerakan Aceh Merdeka juga dilakukan dan menyita barang bukti beberapa pucuk senjata, penculikan 3 kasus, pembunuhan 1 kasus, penembakan 4 kasus, pengamanan dan pengawasan terhadap orang asing juga dapat terlaksana melalui koordinasi lintas sektoral.

KESIMPULAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan perannya dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Aceh pasca gempa dan bencana tsunami pada tahun 2004. Pemulihan pasca bencana dan bantuan yang dilakukan oleh kepolisian negara republik indonesia turut menyumbangkan tenaga dan waktunya untuk pemulihan yang merupakan bagian dari ketahanan pemolisian yang merupakan paradigma baru sebagai bagian dari ketahanan nasional Indonesia. Penelitian menunjukkan adanya kriminalitas yang tetap ada di tengah masyarakat pasca gempa dan bencana tsunami di Aceh tanpa adanya kepolisian, pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat tidak akan terjadi sepenuhnya.

REFERENSI

- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan diskresi kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135–144.
- Agustianti, R., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., & Ikhrum, F. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Tohar Media.
- Dadek, T. A., Jalil, H., Syahbandir, M., & Kadir, M. Y. A. (2023). *Politik Hukum Penanggulangan Wabah (Covid-19) di Indonesia*. Syiah Kuala University Press.
- Djamhari, E. A., Layyinah, A., Mardhiyyah, M., & Wibowo, E. B. (2022). *Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan (Persepsi dan Partisipasi Masyarakat)*.
- Hidayat, O. T. (2022). *Pendidikan Multikultural Menuju Masyarakat 5.0*. Muhammadiyah University Press.
- Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. (2008). Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. *American Journal of Community Psychology*, 41, 127–150.
- Novita, A. A. (2020). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*.
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Alam, M. D. S., & Lisya, M. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Parsons, B., Magill, T., Boucher, A., Zhang, M., Zogbo, K., Bérubé, S., Scheffer, O., Beauregard, M., & Faubert, J. (2016). Enhancing cognitive function using perceptual-cognitive training. *Clinical EEG and Neuroscience*, 47(1), 37–47.
- Rahman, K., & Noor, A. M. (2020). *Moderasi Beragama di Tengah Pergumulan Ideologi Ekstremisme*. Universitas Brawijaya Press.
- Rahmita, N. (2023). *Dampak Negatif Kapitalisme Dalam Al-Qur'an (Studi komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar)*.
- Rijanta, R., Hizbaron, D. R., & Baiquni, M. (2018). *Modal sosial dalam manajemen bencana*. UGM PRESS.
- Umar, H., Purba, R. B., Safaria, S., Mudiar, W., & Sariyo, H. (2021). *The new Strategy in Combating Corruption (Detecting Corruption: HU-Model)*. Merdeka Kreasi Group.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. H. M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R N D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warramah Kolaka.
- Zulkifli, Z. (2020). Jurnal: Fungsi Penegakan Hukum Pidana Terkait Tanggungjawab Diskresi Kepolisian. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 14(1), 35–40.